

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN,
PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN
AUDIT KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS PUBLIK
(Studi Pada Badan dan Dinas Yang Tergabung Dalam Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur)**



SKRIPSI

OLEH :

AMAD HANDANI

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2019**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan.....	v
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Abstrak	xv
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
Bab II. Tinjauan Pustaka	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Penyajian Laporan Keuangan	15
2.2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan	19
2.2.3 Pengawasan Fungsional	21
2.2.4 Audit Kinerja	26

2.2.5 Akuntabilitas Publik	30
2.3 Kerangka Konseptual	33
2.4 Pengembangan Hipotesis	34
Bab III. Metodologi Penelitian	43
3.1 Klasifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian	43
3.1.1 Variabel Penelitian	43
3.1.2 Definisi Operasional Variabel	44
3.1.3 Variabel Dependen (Y)	44
3.1.4 Variabel Independen (X)	45
3.2 Waktu dan Wilayah Penelitian	47
3.3 Jenis Penelitian	47
3.4 Populasi dan Sampel/Obyek Penelitian	47
3.4.1 Populasi	47
3.4.2 Sampel	48
3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel	49
3.5 Jenis Data dan Sumber Data	49
3.5.1 Jenis Data	49
3.5.2 Sumber Data	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data	50
3.7 Instrumen Penelitian	51
3.8 Teknik Analisis Data	52
3.8.1 Uji Instrumen Penelitian	52
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	54

3.8.3 Pengujian Hipotesis	56
Bab IV. Hasil dan Pembahasan	60
4.1 Data Penelitian	60
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	60
4.1.2 Deskripsi Data Penelitian	61
4.2 Analisis Hasil Penelitian	64
4.2.1 Uji Validitas	64
4.2.2 Uji Reliabilitas	67
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	69
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data	78
Bab V. Penutup	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Keterbatasan penelitian	85
5.3 Saran	86
Daftar Pustaka	87
Lampiran - Lampiran	90

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Populasi Penelitian	48
Tabel 4.1	: Distribusi Kuesioner	62
Tabel 4.2	: Jenis Kelamin Responden	62
Tabel 4.3	: Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan	63
Tabel 4.4	: Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja	63
Tabel 4.5	: Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan	64
Tabel 4.6	: Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan.	65
Tabel 4.7	: Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Fungsional	65
Tabel 4.8	: Hasil Uji Validitas Variabel Audit Kinerja	66
Tabel 4.9	: Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik	66
Tabel 4.10	: Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan.	67
Tabel 4.11	: Hasil Uji Reliabilitas Aksesibilitas Laporan Keuangan	67
Tabel 4.12	: Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengawasan Fungsional	68
Tabel 4.13	: Hasil Uji Reliabilitas Variabel Audit Kinerja	68
Tabel 4.14	: Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Publik	68
Tabel 4.15	: Hasil Uji Statistik <i>Non Parametric Kolmogrov-Smirnov (K-S)</i> .	69
Tabel 4.16	: Hasil Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4.17	: Hasil Uji Glejser	72
Tabel 4.18	: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	73
Tabel 4.19	: Hasil Uji Ketepatan Model (Uji F)	74
Tabel 4.20	: Hasil Uji t	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Berfikir	32
------------	---------------------------	----

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN,
PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN
AUDIT KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS PUBLIK
(Studi Pada Badan dan Dinas Yang Tergabung Dalam Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur)**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas publik pada badan dan Dinas yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 33 badan/dinas dengan jumlah responden 66 orang yang terdiri dari Kasubag. Keuangan dan Bendahara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis ini menggunakan model Analisis Regresi Berganda, dengan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R^2), uji-t dan uji-F.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik karena nilai signifikansi sebesar 0,006 maka nilai sig $<0,05$, secara parsial variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik karena nilai signifikansi sebesar 0,000 maka nilai sig $<0,05$, secara parsial variabel pengawasan fungsional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik karena nilai signifikansi sebesar 0,151 maka nilai sig $>0,05$, dan secara parsial variabel audit kinerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik karena nilai signifikansi sebesar 0,294 maka nilai sig $>0,05$. Namun hasil uji hipotesis variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja secara simultan mempengaruhi akuntabilitas publik karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci : Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional, Audit Kinerja dan Akuntabilitas Publik.

**THE EFFECT OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL
STATEMENTS, ACCESSIBILITY OF FINANCIAL STATEMENTS,
FUNCTIONAL SUPERVISION AND PERFORMANCE AUDIT
TOWARDS PUBLIC ACCOUNTABILITY
(Study of Bodies and Agencies Integrated in East Lombok District
Government Apparatus Organizations)**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the presentation of financial statements, the accessibility of financial reports, functional oversight and partial or simultaneous performance audits of public accountability in agencies and offices incorporated in the Regional Apparatus Organization of the East Lombok Regency Government. This type of research uses quantitative research. The sample used in this study is 33 agencies / offices with 66 respondents consisting of Kasubag. Finance and Treasurer of each Regional Apparatus Organization. The sampling technique in this study is the saturation sampling technique. The data source used in this study is primary data. Data collection techniques used in this study were questionnaires. Testing this hypothesis using the Multiple Regression Analysis model, by conducting validity tests, reliability tests, classic assumption tests, coefficient of determination tests (R²), t-tests and F-tests.

Hypothesis test results show that partially the financial statement presentation variable has a positive and significant effect on public accountability because the significance value is 0.006, the sig value <0.05, partially the financial statement accessibility variable has a positive and significant effect on public accountability because the significance value is 0,000. sig value <0.05, partially functional supervision variable has no positive and significant effect on public accountability because the significance value is 0.151, then sig value > 0.05, and partially the performance audit variable has no positive and significant effect on public accountability because of the significance value of 0.294, the value of sig > 0.05. However, the results of hypothesis testing variables of the presentation of financial statements, accessibility of financial statements, functional supervision and performance audits simultaneously affect public accountability because the significance value is 0,000 <0.05.

Keywords: Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements, Functional Supervision, Performance Audit and Public Accountability.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik merupakan sistem informasi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan dari instansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban untuk menciptakan akuntabilitas di pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan *desentralisasi fiscal* dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2010). Setiap daerah harus mampu menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dari daerah yang bersangkutan seperti laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan

yang mengarahkan untuk mengimplementasikan *good governance* maka pemerintah daerah tidak dapat lagi menutup-nutupi kondisi keuangan dari publik.

Perkembangan pengetahuan masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah saat ini menyebabkan tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan di daerah agar lebih transparan dalam membuat suatu laporan keuangan daerah. Pemerintah diwajibkan untuk selalu teliti dalam membuat suatu laporan keuangan agar tidak menimbulkan suatu pertanyaan yang menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap laporan keuangan yang telah di buat oleh pemerintah.

Akuntabilitas dari sebuah laporan keuangan sangat penting bagi instansi Pemerintah. Bahkan dapat dikatakan bahwa peranan laporan keuangan sebagai media akuntabilitas lebih menonjol pada akuntansi pemerintah dibandingkan dengan peranannya untuk penilaian organisasi seperti halnya dalam sektor swasta. Masyarakat akan memberikan penilaian positif kepada pemerintah jika pemerintah secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas keuangan yang transparan dan terpercaya. Transparansi dan kualitas keuangan Pemerintah berperan vital dalam membangun kualitas demokrasi dan pemerintahan yang efektif (*Ter Bogt, Budding & Helden, 2010* dalam Harun, 2010). Evaluasi atas efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran sangat penting dilakukan karena dapat menentukan perumusan strategi di masa mendatang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam negara tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2004: 20). Jadi makna akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya terkait memberikan pelayanan baik pengadaan barang maupun jasa dalam memenuhi hak dan kebutuhan publik kepada pemberi amanah. Dalam meningkatkan sistem akuntabilitas maka harus diketahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja.

Agar tuntutan masyarakat dapat dipenuhi salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik adalah laporan keuangan. Terkait dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi amanat rakyat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan. Menurut Bastian (2006: 247) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Secara spesifik laporan dapat menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atau sumber daya yang dipercayakan. Penyajian laporan keuangan Pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01. Tujuan umum dari laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus mengandung informasi yang relevan dan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini karena organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan dana publik harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka penyajian laporan keuangan sangat mempengaruhi akuntabilitas publik.

Oleh karena itu pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yakni Syaifullah, Aprianti, Nursiam, Apriliani, Sujana, Yuniarta, wahyuni, Sulindawati, Herawati, dan Sande.

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan keuangan harus memenuhi aksesibilitas. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya . Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi laporan keuangan melalui media masa maupun media cetak seperti surat kabar dan internet sebagai bentuk akuntabilitas. Berdasarkan pernyataan tersebut maka aksesibilitas laporan keuangan sangat mempengaruhi akuntabilitas publik.

Oleh karena itu pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yakni Syaifullah, Aprianti, Nursiam, Apriliani, Sujana, Yuniarta, Wahyuni, Sulindawati, Herawati, dan Sande.

Akuntabilitas publik dapat juga terwujud dengan adanya pelaksanaan pengawasan fungsional intern yang efektif. Pengawasan fungsional menurut Ulum (2009) adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditentukan. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut aparat pengawasan fungsional dapat melakukan audit pada organisasi sektor publik. (Bastian 2006).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka pengawasan fungsional sangat mempengaruhi akuntabilitas publik. Oleh karena itu pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yakni Syaifullah, Laksana, Handayani, Suratmi, Herawati, Darmawan, dan Wulandari.

Akuntabilitas publik juga dapat terwujud apabila dilakukan Audit pada organisasi sektor publik, tidak hanya mencakup audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun juga audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit tersebut. Menurut Malan dalam Mardiasmo (2004: 179) mengatakan bahwa audit dalam audit keuangan adalah “Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atau tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya

dengan kriteria/standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut”.

Menurut UU No.15 Tahun 2004 audit kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja menitikberatkan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Dimana audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan prosedur dalam pelaksanaannya (Sherly, 2010 dalam Rahayu, 2011).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka audit kinerja sangat mempengaruhi akuntabilitas publik. Oleh karena itu pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yakni Syaifullah, Suratmi, Herawati, dan Darmawan.

Lombok Timur adalah salah satu dari sekian banyaknya kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Timur sendiri merupakan daerah yang dapat dikatakan sebagai daerah yang kaya karena mempunyai sumber pendapatan yang banyak baik dari pertambangan maupun wisata. Dalam anggaran Kabupaten Lombok Timur memiliki anggaran yang jumlahnya tidak sedikit dan dari tahun 2014-2018 anggaran belanja pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Namun tahun 2015 terjadi fenomena di Kabupaten Lombok Timur sendiri yakni adanya kasus mengenai pembangunan tambatan perahu di Gili Kondo yang pengerjaannya tidak sesuai dengan standar, hal ini sedikit banyak membuat kepercayaan atas keakuntabilisan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalami penurunan. Terlebih di tahun 2015 pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (<http://lombokpost.net/2016/12/01/>).

Hal tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan walaupun tidak fatal. Hal tersebut apabila dibiarkan akan tercipta kecurigaan sehingga dalam setiap kinerja yang dijalankan pemerintah yang sedianya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan efektif. Untuk itu diperlukan upaya dalam meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Laksana dan Handayani (2014) yang meneliti pengaruh kejelasan anggaran, pengawasan fungsional dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik di Kabupaten Batang. Dari hasil penelitian tersebut semua variabel kejelasan anggaran, pengawasan fungsional dan pelaporan kinerja secara parsial tidak berpengaruh pada variabel akuntabilitas publik, namun berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas publik. Dari penelitian tersebut ditemukan ketidaksesuaian khususnya pada variabel pengawasan fungsional. Di khusukan pada variabel pengawasan fungsional karena variabel yang diteliti oleh peneliti terdahulu sama dengan variabel yang akan di teliti dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian

yang diteliti oleh peneliti terdahulu yakni Laksana dan Handayani khususnya pada variabel pengawasan fungsional mengalami ketidaksesuaian (tidak berpengaruh secara parsial) hal ini disebabkan karena hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengawasan fungsional memiliki nilai koefisien (0,210) dengan nilai signifikansi sebesar (0,104), sehingga dinyatakan tidak berpengaruh signifikan. Berlawanan dan tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan yaitu berpengaruh positif. Oleh karena itu hipotesis kedua yaitu pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik ditolak dan tidak sesuai dengan hasil penelitian Wulandari (2013) bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Pernyataan ini diperkuat karena kuesioner pengawasan fungsional diberikan dan diisi oleh pegawai yang berada di dinas-dinas/SKPD Kabupaten Batang, bukan kepada Inspektorat Daerah selaku aparat pengawasan fungsional sehingga jawaban kuesioner tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dalam pengisian kuesioner seharusnya dilakukan oleh Inspektorat daerah yang berperan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap instansi pemerintah. Dengan adanya pengawasan fungsional tersebut dapat diketahui apakah instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013) juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Syaifullah (2016) yakni variabel pengawasan

fungsional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian yakni “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Pada Dinas dan Badan yang Tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penyajian laporan keuangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik ?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik ?
3. Apakah pengawasan fungsional memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik ?
4. Apakah audit kinerja memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik ?
5. Apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja secara simultan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.
2. Mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.
3. Mengetahui pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik.
4. Mengetahui pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik.
5. Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai manfaat antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk melatih dan membangun pola pikir ilmiah serta menginterpretasikannya ke dalam suatu karya ilmiah tertulis dan mencoba menerapkan serta membandingkan teori yang didapat dalam perkuliahan dengan realita yang ada.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran atau menambah pengetahuan bagi penulis dan Mahasiswa

Jurusan Akuntansi untuk perkembangan ilmu akuntansi dan untuk menambah pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

Dalam hal ini akan memperoleh tambahan informasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Klasifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.1.1. Variabel Penelitian

Pengertian variabel penelitian adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif), dapat diartikan variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian (Siyoto, 2015: 50).

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu :

1. Variabel Terikat (Dependen Variabel)

Variabel Dependen sering disebut juga variabel *output*, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Publik.

2. Variabel Bebas (Independen Variabel)

Variabel Independen sering disebut juga sebagai variabel *stimulus*, *preditor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2014). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2), pengawasan fungsional (X_3) dan Audit Kinerja (X_4).

3.1.2. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik pada Badan dan Dinas yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Timur. Sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dengan cara mengukur variabel- variabel yang diteliti.

3.1.3. Variabel Dependen (Y)

Menurut Mardiasmo (2004: 20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Yang dijadikan indikator untuk penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Terkait apakah pelayanan sesuai atau tidak menyalahi aturan/hukum yang berlaku dan dalam pelaksanaannya tidak melakukan penyalahgunaan jabatan.

2. Akuntabilitas Proses

Terkait apakah prosedur dalam pelaksanaan tugas sudah memadai atau belum termasuk didalamnya sistem informasi keuangan, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Terkait apakah dalam mengadakan program sudah dapat menjamin tercapainya tujuan awal dan sudah mempertimbangkan alternatif program yang lain.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Terkait apakah dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (DPR/DPRD) dan masyarakat.

3.1.4. Variabel Independen (X)

1. Penyajian laporan keuangan

Menurut Bastian (2006: 247) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Secara spesifik laporan dapat menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atau sumber daya yang dipercayakan.

Yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah :

- a). Laporan keuangan harus lengkap yakni menyajikan Laporan Realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan
- b). laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2. Aksesibilitas laporan keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Rohman dalam Sande, 2013).

Yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah :

- a). Keterbukaan
- b). Kemudahan
- c). *Accesible*

3. Pengawasan Fungsional

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2002 tentang pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggara pemerintah daerah mengemukakan bahwa: “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, penyusutan dan penilaian”. Baswir (2005) menyatakan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan.

Yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan dari perencanaan anggaran sampai dengan realisasi anggaran.

4. Audit Kinerja

Menurut Rai (2008) mengatakan berdasarkan UU No.15 tahun 2004 dan SPKN, audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah :

1. Keekonomisan kinerja
2. Keefisien kinerja
3. Keefektifitasan kinerja

3.2. Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari penyusunan usulan penelitian sampai terlaksananya laporan penelitian, yakni pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 (8 bulan). Penelitian ini dilakukan pada Badan dan Dinas yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

3.3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. (Siyoto, 2015: 17)

Indriantoro (2002) mengatakan bahwa Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel - variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.4. Populasi dan Sampel/Obyek Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satu-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui (Anggoro dkk, 2007: 4.2).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Badan maupun Dinas yang termasuk dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang berjumlah 33 Badan/Dinas.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No.	Nama Badan/Dinas	No.	Nama Badan/Dinas
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.	Dinas Kelautan dan Perikanan Perikanan
2.	Dinas PMPTSP	19.	Dinas Komunikasi dan Informasi
3.	Badan Pendapatan Daerah	20.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5.	Dinas Perumahan dan Permukiman	22.	Dinas Pemuda dan Olahraga
6.	Dinas PUPR	23.	BAPPEDA
7.	BKPSDM	24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.	Dinas P3AKB
9.	Dinas Perhubungan	26.	RSUD Dr. R. Soedjono Selong
10.	Dinas Koperasi dan UKM	27.	Dinas Sosial
11.	Satuan Pol PP	28.	Sekretariat Daerah
12.	Sekretariat DPRD	29.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13.	Dinas Pariwisata	30.	Dinas Ketahanan Pangan
14.	Dinas Pertanian	31.	Badan KESBANGPOLDAGRI
15.	Dinas Peternakan dan Keswan	32.	Disnakertrans
16.	BPBD	33.	Dinas Kesehatan
17.	Dinas LHK		

3.4.2 Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel adalah himpunan bagian dari populasi (Anggoro dkk, 2007: 4.3).

Sampel penelitian ini adalah 33 badan atau dinas yang termasuk dalam Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kabupaten Lombok Timur.

Dengan jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 2 orang (kepala sub bagian keuangan dan bendahara) setiap badan dan dinas, jika dijumlah maka total responden adalah 2 orang x 33 Dinas/Badan adalah 66 orang.

3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2014) Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Kriteria dalam penelitian ini yaitu orang yang dianggap paling mengerti mengenai sistem akuntabilitas publik terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Orang-orang yang dimaksud yakni orang-orang di masing-masing OPD yang memiliki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan (Kasubag. Keuangan) dan Bendahara. Kasubag. Keuangan dan Bendahara dijadikan responden karena hanya mereka yang lebih mengerti dan lebih paham mengenai pengelolaan keuangannya.

3.5. Jenis Data dan Sumber Data

3.5.1. Jenis Data

Menurut Anggoro dkk (2007) Jenis Data penelitian di bagi menjadi dua yaitu :

- a. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata, kalimat-kalimat ataupun narasi-narasi yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi.
- b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Berdasarkan teori di atas, maka Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif.

3.5.2. Sumber Data

Menurut Muhidin dan Abdurrahman (2009) Sumber Data di bagi menjadi dua yaitu :

- a. Data primer adalah data didapat dan diolah langsung dari objeknya.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen/ publikasi/ laporan penelitian dari dinas/ instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.

Berdasarkan teori di atas maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam hal ini, data ini diperoleh dari responden yang berada dalam Badan dan Dinas yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Timur yakni 33 Badan/Dinas Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Cara mengumpulkan data pada penelitian ini adalah menggunakan angket (kuisisioner). Kuisisioner atau angket merupakan suatu alat/teknik pengumpul data umumnya terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian yang dikehendaki (Anggoro dkk, 2007: 5.6). Kuisisioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur dimana setiap responden dibatasi dalam

memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja. Kuesioner tersebut diberikan kepada reponden secara langsung tanpa melalui perantara oleh peneliti

3.7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode pengumpulan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner, Kuisisioner atau angket merupakan suatu alat/teknik pengumpul data umumnya terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian yang dikehendaki (Anggoro dkk, 2007: 5.6). untuk mengukur jawaban dari responden maka digunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial (Arikunto dalam Darmawan, 2014).

Skala *likert*, skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban. Maka responden diberikan pertanyaan - pertanyaan yang sesuai dengan variabel. Setiap pertanyaan tersebut disertai dengan 5 alternatif jawaban yang harus dipilih responden dan setiap jawaban tersebut dinilai dengan angka seperti berikut :

- | | | | |
|--------------------------------|-------|-------------|-----|
| 1. Jawaban sangat setuju | (SS) | diberi skor | : 5 |
| 2. Jawaban setuju | (S) | diberi skor | : 4 |
| 3. Jawaban ragu - ragu | (RR) | diberi skor | : 3 |
| 4. Jawaban tidak setuju | (TS) | diberi skor | : 2 |
| 5. Jawaban sangat tidak setuju | (STS) | diberi skor | : 1 |

Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat, untuk itu keabsahan dan keandalan data dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya.

3.8. Teknik Analisis Data

Seluruh penyajian dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) for windows. Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari :

3.8.1. Uji Instrumen Penelitian

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) ada dua konsep mengukur kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian tersebut. Penggunaan tersebut masing-masing untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Berikut adalah definisi alat ukur kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Uji Validitas

Menurut Sekaran (2006) Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen yang dibuat untuk mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Alat pengukur yang yang absah akan mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya.

Pengujian validitas dalam penelitian ini melihat nilai Sig. Apabila nilai Sig. $<0,05$ maka pernyataan dianggap valid (Ghozali, 2016). Jika pertanyaan yang tertera dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, maka kuisoner tersebut dapat dikatakan valid. Pertanyaan dikatakan valid jika adanya korelasi signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan dukungan pertanyaan tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Untuk mengujinya menggunakan korelasi Pearson, yaitu dengan mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya. Pengujian signifikan dengan kriteria menggunakan r_{tabel} pada tingkat signifikan 5%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan tersebut adalah valid dan sebaliknya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula. Menurut Ghozali (2016) Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari seseorang (responden) terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Reliabilitas pengukuran di tentukan dengan menghitung koefisien *cronbach alpa* dalam masing-masing instrumen dalam satu variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu teknik *cronbach alpa* digunakan apabila jawaban responden berbentuk skala seperti 1-3 dan 1-5 serta

1-7 atau jawaban responden yang mengintegrasikan penilaian sikap. Hasil pengujian dari suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengujian menghasilkan *Cronbach's Alpha* (r_{α}) $> 0,60$ maka instrumen tersebut reliabel (Ghozali, 2006).

3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik atau tidak. Diperlakukannya uji asumsi klasik untuk menghindari bias. Karena tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan yaitu terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

Berikut adalah pengertian dari uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan ada dua yaitu metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal *P-P Plot of regression standardized*. Apabila titik-titik telah mendekati garis lurus, maka dapat dikatakan *residual* telah mengikuti distribusi normal. dan menggunakan metode statistik yaitu dengan uji *Kolmogorov Smirnov Test*. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas, namun sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2016), Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal.

Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen yang dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor (VIF)*. VIF adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Nilai VIF yang bisa ditoleransi adalah 10. Apabila VIF variabel-variabel independen < 10 , berarti tidak ada Multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heterokedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Hal seperti itu juga disebut sebagai *homokedastisitas* dan jika berbeda disebut *heterokedastisitas* atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk mengetahui ada tidaknya *heterokedastisitas* dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik *scatterplot* melalui nilai prediksi variabel terikat dengan *residual error* dan dengan metode glejser .

Uji *scatterplot* bisa dilakukan dengan melihat pola. Jika tidak ada pola jelas (titik-titik menyebar) serta arah penyebarannya diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan glejser dapat dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel *independent* dengan nilai absolut residualnya. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2016) .

3.8.3. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis penelitian ini menggunakan model Analisis Regresi Berganda (*multiple linear regression method*). Analisis regresi berganda adalah satu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel dependen (*criterion*) tunggal dengan beberapa variabel-variabel independen (*predictor*) (Silalahi, 2012).

Persamaan regresi berganda sebagai berikut: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \dots + e$

Keterangan:

Y	= Akuntabilitas Publik
X ₁	= Penyajian Laporan Keuangan
X ₂	= Aksesibilitas Laporan Keuangan
X ₃	= Pengawasan Fungsional
X ₄	= Audit Kinerja
a	= Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄	= Koefisien Regresi
e	= <i>error</i>

(Muhidin dan Abdurahman, 2009: 199)

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien signifikansi untuk masing-masing variabel independen yang menentukan apakah menerima atau

menolak hipotesis alternatif. Perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_a diterima).

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diuji atau menunjukkan hubungan bahwa korelasi antar kedua variabel cukup nyata. Disamping itu tingkat signifikansi 0,05 sering digunakan dalam penelitian-penelitian ilmu sosial.

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu harus memenuhi semua asumsi OLS (*Ordinary Least Squares*/pangkat kuadrat terkecil biasa) regresi atau sering disebut juga asumsi klasik agar estimasi OLS menjadi linear terbaik tanpa bias atau disebut BLUE (*Best Linear Unbiased Estimates*) (Latan dan Temalagi, 2013:). Ada tiga komponen yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi yaitu koefisien determinasi (*R-squares*), signifikansi uji F dan signifikansi uji t yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas.

2. Uji Ketepatan Model (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel *independen* yang dimasukkan ke model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel *dependen* (Ghozali, 2006). Pengujian F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, dengan Kriteria :

- Jika F hitung $>$ F tabel maka H_a diterima, yang artinya variabel *independent* secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependent*, dan sebaliknya jika F hitung $<$ F tabel maka H_a ditolak, yang berarti variabel *independent* secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependent*.
- Jika nilai sig. $<$ 0,05, maka H_a diterima, yang artinya variabel *independent* secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependent*, dan sebaliknya jika nilai sig. $>$ 0,05, maka H_a ditolak, yang artinya variabel *independent* secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependent*. Berarti model ini cocok digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel *independen* secara parsial terhadap variabel *dependen*.

3. Uji t

Uji- t digunakan untuk menguji pengaruh parsial variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya atau pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi setiap variabel bebas (*independen*) dalam mempengaruhi variabel terikat (*dependen*). Dengan kriteria :

- Apabila nilai signifikansi $<$ 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel *independen* secara individual berpengaruh terhadap variabel *dependen*, dan

jika sebaliknya yaitu nilai signifikansi > 0.05 , maka dapat dinyatakan bahwa variabel *independen* secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel *dependen*, (Ghozali, 2016).

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *independen* berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*, dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *independen* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*, (Latan dan Temalagi, 2013).

Pada penelitian ini, uji-t digunakan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis benar atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas laporan keuangan (X2), pengawasan fungsional (X3) dan audit kinerja (X4) secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik (Y).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Uji Hipotesis dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel penyajian laporan keuangan dan variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig. < 0.05 . Dan secara parsial variabel pengawasan fungsional dan variabel audit kinerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai sig. > 0.05 .
2. Hasil uji F menunjukkan hasil bahwa bahwa nilai F_{hitung} sebesar 8,398 dan F_{tabel} sebesar 2,52, oleh karena itu $F_{hitung} > F_{tabel}$. Nilai probabilitas pada kolom signifikan sebesar 0,000. Karena nilai sig. $0,000 < 0,05$ artinya penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja secara simultan mempengaruhi akuntabilitas publik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Keterbatasan peneliti antara lain :

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel OPD di Lingkup Badan dan Dinas saja, tidak melibatkan OPD tingkat Kecamatan.

2. Penelitian ini hanya melibatkan Kasubag. Keuangan dan Bendahara dimasing-masing Badan dan Dinas sebagai responden.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran kepada peneliti selanjutnya yakni :

1. Untuk peneliti selanjutnya dalam mengambil sampel diharapkan tidak hanya OPD di Lingkup Badan dan Dinas saja melainkan diharapkan melibatkan OPD tingkat Kecamatan.
2. Untuk peneliti selanjutnya di harapkan untuk memperluas cakupan responden yakni tidak hanya Kasubag. Keuangan dan Bendahara saja, melainkan mengikutsertakan Kepala Badan dan Dinas masing-masing OPD agar penelitian dapat mewakili keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro dkk. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Aprianti, Dian dan Nursiam. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Boyolali). *Jurnal, FEB UMS*.
- Apriliani, Ni Kadek Alit dkk. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Baswir, R. 2005. *Akuntansi pemerintahan indonesia*. Jogjakarta : BPFE.
- Darmawan, N.A.S. 2014. Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintahan kabupaten bandung). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Statistik non-parametrik, teori dan aplikasi dengan program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 8*. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, B.D. 2014. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik di kabupaten batang. *Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765*. Universitas Negeri Semarang.
- Harun, 2010. *Evaluasi Empiris Terhadap Kapasitas Suatu Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 8*. Jakarta.
- [Http://lombokpost.net/2016/12/01/](http://lombokpost.net/2016/12/01/). Diakses tanggal 08 Februari 2018.

- Indriantoro, N dan Supomo, B. 2002. *Metodologi penelitian bisnis: untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Latan, H dan Temalagi S. 2013. *Analisis multivariate teknik dan aplikasi program IBM SPSS 20.0*. Bandung: Alfabeta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Erlangga
- Mahsun dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi sektor publik*, Edisi II, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muhidin dan Maman Abdurahman. 2009. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mulyana, B. 2006. Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.2.pp. 65-78*.
- Mustofa, A.I. 2012. Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten pemalang. *Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765*. Universitas Negeri Semarang.
- Rahayu, C. 2011. Pengaruh audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik. Skripsi. Unikom Bandung.
- Rai, I.G.A. 2008. *Audit kinerja sektor publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sadjiarto, A. 2000. *Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2, No. 2, November 2000: 138 – 150.

- Sande, P. 2013. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah provinsi sumatra barat). Artikel Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang.
- Sekaran. 2006. *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratmi, Ni Made, dkk. 2014. Pengaruh audit kinerja, dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik.
- Syaifullah, Wildan Andika. 2016. Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik (studi empiris pada Badan dan Dinas yang tergabung dalam SKPD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ulum, I. 2009. *Audit sektor publik suatu pengantar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahyuni, Putu Sri dkk. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung). Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wildani, O. 2014. Pengaruh audit kinerja dan aksesibilitas laporan keuangan. Universitas Komputer Indonesia.
- Wulandari, I. 2013. Pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintah kota padang. Artikel. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.